

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P. Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37 Tahun 1998)*. Bandung: Mandar Maju.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali. 2004. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- , 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Adrian Sutedi, 2014, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar grafika.
- , 2018. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. cet.9. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertipikat dan Permasalahannya*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Bachtiar Effendi. 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya)*. Jilid 1 *Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- , 2018. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaannya*. Cet. Ke.4. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Busyra Azheri. 2011. *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*. Raja Grafindo Perss, Jakarta. hlm 352.
- Chadidjah Dalimunthe. 2002. *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*. Medan: FH USU Press.
- C.S.T. Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Danrivanto Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Effendi Parangin. 1991. *Hukum Agraria di Indonesia. Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Elza Syarief. 2014. *Pensertipikatan Tanah Bekas Hak Eigendom Cet. Ke.1*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Farida Patittingi, Oktaviani. 2023. *Implementasi QR (Quick Response) Code pada sertifikat tanah Elektronik*. Makassar: Tohar Media.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hans Kelsen (a). 2007. *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi. General Theory Of law and State. Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia.
- Harli Sirega. Sakafa Guraba. 2023. *Admisibilitas bukti elektronik dalam persidangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Irawan Soerodjo. 2002. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Aekola Surabaya.
- , 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arloka
- , 2014. *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi. Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Irwansyah. 2022. *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- James Julianto Irawan. 2014. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Jimmy Joses Sembiring. 2010. *Paduan Mengurus Sertipikat Tanah*. Jakarta: Visi Media.
- Jonaedi Efendi. Prasetyo Rijadi. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurnia Rheza Randy Adinegoro, 2023, *Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 19, No. 1.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

- Margono. 2015. *Asas Keadilan. Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim Cet I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria S.W Sumardjono. 2001. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Maskun. 2012. *Kejahatan siber (cyber crime) suatu pengantar*. Makassar: kencana Prenadamedia group.
- Mhd. Yamin Lubis & Rahim Lubis. 2010. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Munir Fuady, 2020, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nico Ngani. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira
- Oemar Moechthar. Soelistyowati, Ellyne Dwi Poespasari, 2021. *Pendaftaran Tanah: Sertipikat Elektronik kepemilikan hak atas tanah di Indonesia*. UNAIR.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- R. Hermanses. 1981. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Direktorat Jenderal Agraria.
- Salim HS. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samun Ismaya. 2013. *Hukum administrasi pertanahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soedikno Mertokusumo. 1988. *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka.
- Soedikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi. 2006. *Hukum Agraria*. Palu: Sinar grafika.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. cet. ke-2*. Jakarta: Kencana.
- , 2011. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wantjik Saleh, 1997, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Jurnal, Tesis dan Disertasi

- Ana Silviana, 2021, *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 4 Issue 1.
- Andi Batari Anindhita, et.al. 2021. *Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum*, *Amanna Gappa*, Vol. 29 No. 2.
- Arba. S. H. 2014. "The Legal Protection Of Community Rights In Area Spatial Planning Of Mataram City Base On The Local Regulation Number 12 Year 2011." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 2.1.
- Dian Aries mujiburohman, 2021, *Transformasi dari Kertas ke Elektronik : Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Elektronik*, *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 7 No.1.
- Djulaeka & Ridho Jusmadi. 2013. *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*. *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 3.
- Fitriyani. Dwi Nurhayati. 2014. "Perlindungan Hukum Bagi Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 286/Pdt.G/2012/Jkt-sel)". Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Harris Yonatan Parmahan Sibuea. 2011. *Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama kali*. *Jurnal Negara Hukum*. Volume 2 Nomor 2. Bidang Penelitian Pusat Penelitian: Badan Keahlian DPR RI.
- Josef M Monteiro. 2007. *Putusan Hakim Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. April 2007. Volume 25 No.2. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan.
- Kurnia Rheza Randy Adinegoro, 2023, *Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*, *Jurnal Ilmu Kenotariatan* Volume 4 Issue 2.
- Liong. 2022. *Hakikat Pemeliharaan Data Pendaftaran Hak Atas Tanah Berbasis Elektronik Terintegrasi*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- Mustahar. 2021. *Kekuatan Eksekutorial Akta Pengakuan Utang (the executorial power of the deed of indebtedness acknowledgement)*. Disertasi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Rahmat Ramadhani, 2017, *Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah*, *Journal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 1.
- Rommy Haryono Djojarahardjo. 2019. *Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan. Volume 5 Nomor 1. Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya. Surabaya.
- Satria Nurul Suci. 2021, *penerbitan sertifikat tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang pajak tanahnya masing terhutang*. Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Silviana, A. 2021, *Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia*, *Administrative Law and Governance Journal*, 4(1).
- Suci Febrianti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik*, *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 3.
- Sumartoputra, M. I., & Endipradja, F. T. 2020, *lability Of Land Deed Official (The PPAT) on Falsifying Document Under Indonesian Land Regulations*. *International Journal of Latin Notary*, 1(1),
- Qisthi Fauziyyah Sugianto. 2019. "Peluang dan Tantangan Calon Notaris dalam Menghadapi Perkembangan Disrupsi Era Digital." *Jurnal Notarius* Volume 12 Nomor 2.
- Wahyu Surya Dharma. Surya Perdana. dan Juli Moertiono, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pendaftaran Tanah Yang Dilakukan Secara Elektronik*. *Legalitas, Jurnal Hukum*. 15(1).

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
- Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Sertipikat Elektronik Versi 1.0, Nomor 3/JUKNIS-HR.02/III/2024.